



The Effect of Labor Force Participation Rate, Minimum Wage and Education in Regencies/Cities of East Java Province in 2020 - 2024

Erika Fitra Nur Aina

Universitas Negeri Surabaya

Corresponding Author: Erika Fitra Nur Aina erikafitra86@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Poverty, TPAK, Minimum Wage, Education, Panel Data

Received : 16, March

Revised : 18, May

Accepted: 20, July

©2026 Aina: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

Poverty remains a significant issue in the economic structure of East Java Province, where significant regional disparities and high levels of economic vulnerability among households are present. This study aims to examine the effect of Labor Force Participation Rate (TPAK), Minimum Wage (UMK), and Education Level on Poverty Levels in 38 Regencies/Cities in East Java over a five-year period, from 2020 to 2024. This study used a quantitative approach by analyzing panel data sourced from the Central Statistics Agency (BPS) of East Java Province. The result show that, collectively, TPAK, UMK, and Education level have a significant influence on poverty levels. Partially, education is the variable with the largest and significantly negative influence on poverty.

Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Upah Minimum dan Pendidikan di Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 - 2024

Erika Fitra Nur Aina

Universitas Negeri Surabaya

Corresponding Author: Erika Fitra Nur Aina erikafitra86@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata kunci: Kemiskinan, TPAK, Upah Minimum, Pendidikan, Data Panel

Received : 16, Maret

Revised : 18, Mei

Accepted: 20, Juli

©2026 Aina: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Kemiskinan tetap menjadi isu signifikan dalam struktur ekonomi Provinsi Jawa Timur, di mana terdapat kesenjangan regional yang signifikan dan tingkat kerentanan ekonomi yang tinggi di antara rumah tangga. Studi ini bertujuan untuk meneliti pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Upah Minimum (UMK), dan Tingkat Pendidikan terhadap Tingkat Kemiskinan di 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur selama periode lima tahun, dari 2020 hingga 2024. Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menganalisis data panel yang berasal dari Badan Statistik Pusat (BPS) Provinsi Jawa Timur. Hasilnya menunjukkan bahwa, secara kolektif, TPAK, UMK, dan tingkat pendidikan memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sebagian, pendidikan adalah variabel dengan pengaruh negatif terbesar dan signifikan terhadap kemiskinan.

PENDAHULUAN

Di era globalisasi saat ini, pembangunan ekonomi merupakan komponen utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan mampu menurunkan tingkat kemiskinan ataupun meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kemiskinan telah menyebar ke berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, politik, sosial, dan kesehatan (Sianturi et al., 2024). Meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan untuk menangani problematika ini, kemiskinan tetap menjadi tantangan besar di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia (Umi & Kundhani, 2021).

Provinsi Jawa Timur sebagai penyangga ekonomi terbesar kedua di Indonesia terus berupaya menekan angka kemiskinan. Dinamika kemiskinan di provinsi ini menunjukkan penurunan dalam beberapa tahun terakhir, namun tetap menjadi isu kompleks yang memerlukan perhatian serius. Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur merupakan fenomena yang kompleks dan menunjukkan disparitas geografis yang tajam antarkabupaten dan kota. Meski secara agregat angka kemiskinan provinsi ini kerap berada di bawah rata-rata nasional, kesenjangan antardaerah tetap menjadi masalah mendasar. Periode 2020-2024 menjadi fase kritis dalam dinamika kemiskinan, yang diawali oleh guncangan pandemi COVID-19 dan dilanjutkan dengan tantangan pemulihan di tengah gejolak ekonomi global. Meskipun demikian, tingkat penurunan kemiskinan masih berjalan lambat dan belum merata di seluruh wilayah.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator penting yang menunjukkan seberapa besar penduduk usia produktif yang terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi. Menurut Nur Alfiyani (2025) TPAK yang tinggi secara teoritis dapat meningkatkan pertumbuhan pendapatan dan mengurangi kemiskinan. Namun, peningkatan TPAK perlu diimbangi dengan kualitas pekerjaan yang layak. Tanpa kualitas pekerjaan yang baik, peningkatan partisipasi hanya akan menghasilkan penambahan tenaga kerja berpenghasilan rendah yang tidak mampu keluar dari jerat kemiskinan.

Sementara itu, Upah Minimum Kabupaten/Kota berperan sebagai instrumen penting dalam memastikan penghasilan layak bagi pekerja. Upah minimum yang memadai dapat membantu meningkatkan pendapatan sehingga pekerja mampu memenuhi kebutuhan dasar dan keluar dari kemiskinan (Sari et al., 2021). Namun, efektivitas kebijakan upah minimum dalam mengurangi kemiskinan sangat bergantung pada struktur ekonomi dan tingkat produktivitas di masing-masing daerah. Di wilayah dengan sektor formal yang kuat, kenaikan upah minimum memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan pekerja. Sebaliknya, di daerah dengan dominasi sektor informal dan usaha kecil, kebijakan ini perlu dikelola dengan bijaksana untuk menghindari dampak negatif seperti pengurangan tenaga kerja.

Pendidikan yang diukur dengan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) menjadi fondasi penting dalam pengembangan modal manusia (human capital). Peningkatan RLS bukan hanya tentang memperpanjang waktu sekolah, tetapi yang lebih krusial adalah memberikan individu keterampilan kognitif dan teknis yang diperlukan di pasar kerja. Pendidikan yang lebih tinggi memberikan akses ke pekerjaan dengan produktivitas dan imbalan yang lebih baik, menjadi pemicu mobilitas sosial vertikal, serta memberdayakan individu dalam mengambil keputusan ekonomi dan kesehatan yang lebih bijak. Meskipun RLS di Jawa Timur menunjukkan tren peningkatan, provinsi ini masih termasuk dalam kategori dengan RLS terendah di Indonesia, sehingga upaya peningkatan kualitas pendidikan tetap menjadi prioritas.

Interaksi ketiga variabel ini menciptakan dinamika di mana kemiskinan di Jawa Timur memang menurun, namun penurunannya berjalan lambat dan cenderung tidak merata karena ketidakmerataan upah minimum, rendahnya kualitas partisipasi angkatan kerja, serta kesenjangan pendidikan antar daerah. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Upah Minimum, dan Pendidikan terhadap Kemiskinan di 38 kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur periode 2020-2024.

TINJAUAN PUSTAKA

Ragnar Nurkse memperkenalkan teori Lingkaran Setan Kemiskinan melalui karyanya "*Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries*" (1953). Ragnar Nurkse menjelaskan bahwa kemiskinan adalah kondisi yang berlangsung terus-menerus tanpa awal atau akhir yang jelas. Dalam teori ini, pendapatan yang rendah membuat orang sulit menyimpan uang, sehingga investasi dan modal pun rendah. Hal ini menyebabkan produksi yang tidak efisien dan pendapatan tetap rendah, sehingga menciptakan siklus kemiskinan yang sulit untuk diakhiri. Menurut Nurkse, kemiskinan disebabkan oleh dua faktor yaitu penawaran dan permintaan. Dalam hal penawaran, kurangnya modal menyebabkan penurunan produktivitas yang berakibat pada penurunan pendapatan masyarakat. Di sisi permintaan, dorongan investasi di negara-negara miskin masih sangat rendah akibat produktivitas rendah dan keterbatasan pasar (Permata & Parianom, 2025).

Kemiskinan adalah konsep multidimensi yang terus berkembang. Secara umum, kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Menurut World Bank, (2000) kemiskinan adalah kekurangan dalam kesejahteraan seseorang yang mencakup berbagai aspek kehidupan. Badan Pusat Statistik, (2021) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar yang diukur berdasarkan pengeluaran untuk makanan dan kebutuhan lainnya.

Kemudian TPAK adalah indikator penting yang menunjukkan seberapa besar penduduk usia kerja yang terlibat dalam aktivitas ekonomi. Menurut BPS, (2023) TPAK didefinisikan sebagai persentase jumlah angkatan kerja dibandingkan dengan total penduduk usia 15 tahun ke atas. TPAK yang tinggi dapat menunjukkan kondisi ekonomi yang baik, namun juga dapat menunjukkan tekanan ekonomi yang membuat lebih banyak orang terpaksa masuk ke pasar kerja.

Selanjutnya Upah minimum ditetapkan untuk memenuhi standar hidup minimum yang mencakup kesehatan, efisiensi, dan kesejahteraan pekerja (Akbar et al., 2022). Penetapan upah minimum bertujuan meningkatkan derajat penduduk berpendapatan rendah, terutama pekerja miskin. Jika upah minimum tidak sesuai dengan peningkatan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), hal ini dapat menyebabkan kemiskinan lebih lanjut (Sari et al., 2021).

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) adalah indikator yang mengukur rata-rata durasi pendidikan yang ditempuh penduduk usia 15 tahun ke atas. Menurut teori modal manusia, investasi pendidikan dapat meningkatkan produktivitas individu dan kapasitas inovasi masyarakat. Berbagai studi empiris juga menunjukkan bahwa kenaikan satu tahun RLS berpengaruh positif terhadap kenaikan pendapatan per kapita dan penurunan tingkat kemiskinan, meskipun besarnya dampak bergantung pada kualitas pendidikan dan kondisi lembaga pendidikan di tiap wilayah (Lillah & Arisetyawan, 2025).

Hipotesis Penelitian

Dirumuskan hipotesis penelitian untuk landasan prediksi untuk menjawab rumusan permasalahan. Hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. TPAK diduga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.
2. UMK diduga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.
3. Pendidikan (RLS) diduga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.
4. TPAK, UMK, dan pendidikan secara simultan diduga berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori untuk menguji hubungan kausal antara TPAK, UMK, dan pendidikan terhadap kemiskinan. Data yang digunakan adalah data panel yang menggabungkan data *time series* (2020-2024) dan *cross-section* di 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

Data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur melalui publikasi resmi dan situs web BPS. Data mencakup Tingkat Kemiskinan dalam satuan persentase, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dalam satuan persentase, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dalam satuan Rupiah (Logaritma Natural), dan Pendidikan (RLS) dalam satuan tahun untuk 38 kabupaten/kota selama periode 2020-2024.

Model regresi data panel yang digunakan adalah:

$$Pov_{it} = \alpha + \beta_1 TPAK_{it} + \ln \beta_2 UMK_{it} + \beta_3 RLS_{it} + e_{it} \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan :

TPAK = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

UMK = Upah Minimum Kabupaten/Kota

RLS = Rata-Rata Lama Sekolah

Pov = Persentase Kemiskinan

i = Objek (38 Kabupaten/Kota)

t = Waktu (2020-2024)

e = Komponen error

 α = Konstanta β = Intersep

ln = Logaritma Natural

Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi data panel kemudian diolah dengan bantuan software Stata. Pemilihan model yang paling tepat, diperlukan pengujian Uji Chow dan Uji Hausman untuk menentukan Model *Common Effect (Pooled Least Square)*, *Fixed Effect (FE)* atau *Random Effect (RE)* yang digunakan untuk regresi data panel (Silvia, 2023). Selanjutnya, Uji asumsi klasik yang digunakan meliputi uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Uji hipotesis dilakukan melalui uji simultan dan uji parsial.

HASIL PENELITIAN**Analisis Deskriptif****Tabel 1. Hasil Analisis Deskriptif**

	Pov	TPAK	UMK	RLS
Mean	10,55	71,82	2589393	8,22
Minimum	3,06	63,08	1913322	4,85
Maximum	23,76	86,62	4725479	12,11
Std.Dev	4,41	3,69	788596	1,61
Obs	190	190	190	190

Sumber: Hasil Olahan Stata 17, 2026

Berdasarkan hasil analisis deskriptif pada Tabel 1, seluruh variabel dalam penelitian ini memiliki jumlah observasi sebanyak 190 data, yang menunjukkan bahwa data yang digunakan cukup representatif untuk menggambarkan kondisi 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur selama periode 2020-2024.

Variabel Kemiskinan (Pov) memiliki nilai rata-rata sebesar 10,55%, dengan nilai minimum 3,06% dan maksimum 23,76%. Standar deviasi sebesar 4,41 menunjukkan adanya variasi yang cukup besar antar daerah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tingkat kemiskinan tidak merata, di mana terdapat daerah dengan angka kemiskinan yang sangat rendah—umumnya wilayah perkotaan atau industri seperti Surabaya dan Gresik—sementara daerah lain masih memiliki tingkat kemiskinan yang relatif tinggi seperti di wilayah Madura dan Tapal Kuda.

Variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) memiliki rata-rata sebesar 71,82%, dengan nilai minimum 63,08% dan maksimum 86,62%. Standar deviasi sebesar 3,69 menunjukkan variasi yang relatif kecil antar wilayah, mengindikasikan bahwa partisipasi angkatan kerja di Jawa Timur secara umum cukup tinggi dan merata.

Variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dalam bentuk logaritma natural memiliki rata-rata Rp2.589.393 dan standar deviasi yang cukup besar, yaitu Rp788.596. Besarnya deviasi standar ini menegaskan adanya variasi upah minimum yang signifikan antarkabupaten/kota. Rentang yang sangat lebar, dari Rp1.913.322 hingga Rp4.725.479 menunjukkan adanya perbedaan upah minimum antar daerah, di mana wilayah perkotaan dan industri memiliki UMK lebih tinggi dibandingkan daerah perdesaan.

Variabel Pendidikan yang diukur dengan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) memiliki rata-rata 8,22 tahun (setara SMP kelas 8), dengan nilai minimum 4,85 tahun dan maksimum 12,11 tahun. Standar deviasi sebesar 1,61 menunjukkan kesenjangan pendidikan yang dalam antar daerah, di mana wilayah perkotaan seperti Surabaya dan Malang memiliki RLS di atas 11 tahun, sementara wilayah Madura dan pesisir utara masih berada di kisaran 6,5 hingga 7,5 tahun.

Secara keseluruhan, hasil analisis deskriptif menunjukkan adanya ketimpangan antar daerah yang signifikan di Jawa Timur, terutama pada tingkat kemiskinan dan pendidikan, sementara partisipasi angkatan kerja relatif merata namun belum optimal dalam menurunkan kemiskinan karena terkendala kualitas pekerjaan dan rendahnya upah.

Hasil Pemilihan Model

Proses pemilihan model regresi data panel bertujuan menentukan metode estimasi yang paling sesuai dengan karakteristik data. Pengujian dilakukan melalui uji Chow dan uji Hausman untuk membandingkan model *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Hasil estimasi pemilihan model ditampilkan di bawah ini:

Tabel 2. Hasil Pemilihan Model

Jenis Uji	Effect Test	Probabilitas	Keputusan
Uji Chow	Prob > F	0,00	FEM
Uji Hausman	Prob > Chi2	0,00	FEM

Sumber: Hasil Olahan Stata 17, 2026

Berdasarkan uji Chow dan uji Hausman pada tabel diatas, model terbaik yang terpilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM) pada tingkat signifikansi 5%.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Setelah uji Hausman memilih *Fixed Effect Model*, uji Lagrange Multiplier tidak diperlukan. Sebelum estimasi, dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan validitas hasil regresi.

Tabel 3. Hasil Uji Asumsi Klasik

Jenis Uji	Statistik Uji	Nilai
Uji Multikolineritas	Mean VIF	1,22
Uji Heteroskedastisitas	chi2(1)	19,81
	Prob > chi2	0,00

Sumber: Hasil Olahan Stata 17, 2026

Sebagaimana yang tertera pada tabel, hasil pemeriksaan uji multikolineritas menunjukkan bahwa rata rata nilai VIF < 10 maka dapat disimpulkan tidak terdapat korelasi ekstrem antar variabel independen yang digunakan dalam model. Kemudian hasil pengujian heteroskedastisitas menunjukkan bahwa Prob > Chi2 0,00 > 0,05 maka dinyatakan terjadi gejala heteroskedastisitas.

Menurut Silvia, (2023) jika residual model regresi tidak memiliki variasi yang konsisten atau bisa dikatakan masih bervariasi antar waktu atau antar individu, heteroskedastisitas akan muncul. Hal ini dapat diatasi dengan *Robust standard error*. Perhitungan standard error pada dasarnya tidak mengubah hasil estimasi koefisien regresi. Meski hasil estimasi koefisien regresi tetap tidak efisien, inferensia statistik tetap bisa dilakukan.

Hasil Estimasi Regresi

Regresi data panel menggunakan Fixed Effect Model disajikan pada tabel 4. Model ini menganalisis pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Upah Minimum dan Pendidikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur tahun 2020-2024.

Tabel 4. Hasil Estimasi Regresi

Variabel	Koefisien	Std.Error	t-Statistic	P-Value
TPAK	-0,04	0,02	-2,68	0,01
UMK	-5,17	1,05	-4,94	0,00
RLS	-0,61	0,25	-2,38	0,02
Variabel	Koefisien	Std.Error	t-Statistic	P-Value
Cons	94,82	13,64	6,95	0,00
R.Squared				
Within	0,60			
Between	0,43			
Overall	0,43			
F-statistik	48,35			
Prob > F	0,00			

Sumber: Hasil Olahan Stata 17, 2026

Hasil estimasi menunjukkan bahwa TPAK, UMK dan RLS berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Nilai R-squared (within) sebesar 0,60 mengindikasikan bahwa 60% variasi tingkat kemiskinan dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut. Nilai F-statistik sebesar 48,35 dengan probabilitas 0,00 (< 0,05) mengkonfirmasi bahwa secara simultan ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan TPAK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2020-2024. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan proporsi penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi berkontribusi nyata terhadap penurunan jumlah penduduk miskin. Hasil ini sejalan dengan teori lingkaran setan kemiskinan Nurkse, di mana rendahnya partisipasi angkatan kerja memperkuat kemiskinan melalui rendahnya pendapatan, tabungan, dan investasi. Peningkatan TPAK mampu memutus rantai tersebut dengan membuka akses pendapatan yang lebih baik. Temuan ini juga konsisten dengan penelitian Muttaqin & Anwar, (2023) dan Andini & Zakiyyah (2024) yang menemukan korelasi negatif signifikan antara TPAK dan kemiskinan. Namun terlihat besaran pengaruh dan mekanisme TPAK yang bervariasi antar Kabupaten/Kota. Di daerah dengan sektor industri dan jasa yang kuat, peningkatan TPAK dimanfaatkan oleh sektor formal dengan upah dan perlindungan yang konsisten. Sementara di daerah yang bergantung pada pertanian atau sektor informal, peningkatan TPAK sering berkaitan dengan pekerjaan musiman berdaya beli terbatas, sehingga fenomena "*working poor*" masih mungkin muncul.

Selanjutnya, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa Upah Minimum berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan di tingkat Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan penyesuaian upah minimum di tingkat daerah secara umum bekerja dengan baik sebagai alat perlindungan sosial yang efektif. Kenaikan upah minimum (UMK) memberikan dampak langsung terhadap pendapatan pekerja formal dan sebagian pekerja informal yang gajinya dihitung berdasarkan UMK tersebut, sehingga meningkatkan kemampuan belanja dan mengurangi risiko keluarga pekerja dengan penghasilan rendah terjebak dalam kemiskinan. Dalam teori lingkaran kemiskinan, kenaikan upah ini memberikan tambahan penghasilan yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan mungkin menghasilkan tabungan kecil, yang merupakan langkah awal untuk memutus siklus rendahnya penghasilan dan investasi. Penelitian ini sejalan dengan temuan Pimada, (2024) yang menyatakan peningkatan upah minimum membantu pekerja keluar dari siklus kemiskinan. Namun, dampak penurunan kemiskinan terasa paling signifikan di kabupaten/kota dengan struktur ekonomi berbasis industri manufaktur dan jasa formal. Di daerah dengan sektor pertanian subsisten dan UMKM, kenaikan UMK yang tidak diimbangi peningkatan produktivitas dapat menyebabkan pengurangan tenaga kerja formal dan peningkatan pekerjaan informal.

Hasil penelitian menunjukkan variabel pendidikan (RLS) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Temuan ini sesuai dengan teori lingkaran kemiskinan, di mana tingkat pendidikan rendah merupakan faktor utama yang menjebak seseorang dalam siklus kemiskinan. Peningkatan RLS menunjukkan peningkatan kualitas tenaga kerja, kemampuan kerja, akses ke pekerjaan berupah tinggi, dan kapasitas menghadapi perubahan ekonomi. Pendidikan berperan sebagai investasi jangka panjang yang memutus siklus kemiskinan secara struktural melalui peningkatan kemampuan individu.

Penelitian ini didukung oleh Fitria et al., (2024) dan Lillah & Arisetyawan, (2025) yang menyatakan RLS berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Namun, tingkat kekuatan hubungan antara RLS dan penurunan kemiskinan tidak sama di semua wilayah. Di daerah dengan ekonomi beragam dan sektor modern, kenaikan RLS menunjukkan hasil sangat baik dalam mengurangi kemiskinan karena pasar kerja mampu menyerap lulusan berpendidikan tinggi. Sebaliknya, di daerah yang sangat tergantung pada sektor primer, hubungan antara RLS dan kemiskinan lebih lemah karena ketidaksesuaian antara peningkatan pendidikan dengan jenis pekerjaan yang tersedia.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Upah Minimum (UMK), Pendidikan (RLS) secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2020-2024. Selain itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Upah Minimum (UMK), dan Pendidikan (RLS) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut merupakan prediktor penting dalam menjelaskan variasi tingkat kemiskinan antar daerah di Jawa Timur.

Namun, efektivitas ketiga variabel tersebut sangat bergantung pada karakteristik wilayah. Di daerah tertinggal seperti Madura dan Tapal Kuda, peningkatan TPAK belum mampu menurunkan kemiskinan secara optimal karena terbatasnya lapangan kerja berkualitas dan rendahnya upah. Sementara itu, kebijakan UMK yang seragam tanpa mempertimbangkan produktivitas daerah justru berpotensi menimbulkan dampak negatif seperti pengurangan tenaga kerja formal di sektor usaha mikro dan kecil. Kesenjangan pendidikan yang dalam antar daerah juga menjadi kendala struktural, di mana peningkatan RLS di daerah tertinggal tidak serta-merta menurunkan kemiskinan jika tidak diiringi dengan ketersediaan lapangan kerja yang sesuai.

Oleh karena itu, Pemerintah daerah perlu memprioritaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan agar kompetensi tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Kebijakan penetapan upah minimum hendaknya mempertimbangkan tingkat produktivitas dan daya saing daerah agar kenaikan upah tidak menimbulkan dampak negatif seperti pengurangan tenaga kerja formal. Pemerintah juga didorong untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan berkualitas, terutama di daerah tertinggal, melalui pengembangan sektor-sektor produktif dan padat karya. Dengan demikian, sinergi antara peningkatan pendidikan, kebijakan upah yang tepat, dan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas diharapkan mampu mendorong penurunan kemiskinan secara berkelanjutan di Provinsi Jawa Timur.

PENELITIAN LANJUTAN

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada periode penelitian yang relatif pendek yaitu tahun 2020–2024, yang mana rentang waktu tersebut mencakup masa pandemi COVID-19 beserta fase pemulihan ekonominya, sehingga data yang dihasilkan menunjukkan fluktuasi yang cukup tinggi. Selain itu, ruang lingkup variabel dalam penelitian ini baru terbatas pada tiga variabel independen, yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Upah Minimum, dan Pendidikan, sehingga masih terdapat kemungkinan variabel-variabel lain yang turut memengaruhi kemiskinan namun belum diikutsertakan dalam model analisis.

Untuk itu, Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas rentang waktu penelitian guna menangkap dinamika kemiskinan secara lebih komprehensif dan melihat dampak kebijakan dalam jangka panjang. Peneliti selanjutnya juga dapat menambahkan variabel-variabel lain yang diduga memiliki pengaruh terhadap kemiskinan, seperti tingkat inflasi daerah, Indeks Pembangunan Manusia, atau tingkat pengangguran terbuka, guna memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai mekanisme pengaruh antar variabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A., Primandari, N. R., & Muhariah, A. (2022). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2017-2020. 10(02), 80–91. <https://doi.org/10.33019/Equity.V10i2.127>.
- Andini, A., & Zakiyyah, N. A. A. (2024). Pengangguran Terbuka, PDRB, Dan Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Kemiskinan Di Jawa Tengah Tahun 2017-2022. *Journal Of International Taxation Accounting And Auditing*, 3(1), 64–79. <https://doi.org/10.62668/Jitaa.V3i1.1169>.
- BPS. (2021). Perhitungan Dan Analisis 2021. Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2023). Keadaan Angkatan Kerja Provinsi DKI Jakarta.
- Fitria, D., Novita, D., Hanum, N., & Andiny, P. (2024). Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Aceh. 5(9), 666–673.
- Lillah, N., & Arisetyawan, K. (2025). Independent : *Journal Of Economics* E-ISSN 2798-5008. 5, 138–151.
- Muttaqin, M., & Anwar, K. (2023). Pengaruh Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia. 2(2), 83–95. <https://doi.org/10.29103/Jaie.V2i2.14567>.
- NUR ALFIYANI, M. S. (2025). Analisis Perbandingan Tpak Dan Tpt Terhadap Kemiskinan. 134–139. <https://doi.org/10.59896/Gara.V19i1.192>.
- Permata, A., & Parianom, R. (2025). Analisis Pendapatan, Pendidikan, Kesehatan Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Jawa Barat. 4(1), 77–97.
- Pimada, L. M. (2024). Socioeconomic Dynamics And Poverty Rate In East Java : A. 9(1), 107–127. <https://doi.org/10.20473/Jde.V9i1.51515>.

- Sari, Y. A., Studi, P., Pembangunan, E., & Ekonomi, F. (2021). Pengaruh Upah Minimum Tingkat Pengangguran Terbuka Jawa Tengah. 10(2), 121–130.
- Sianturi, A. F., Tampubolon, A., Hidayat, N., Nasution, M. D., & Sianturi, R. (2024). Pengaruh Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Kota Medan (2014-2023). JALAKOTEK: Journal Of Accounting Law Communication And Technology, 1(2), 739–750.
<https://doi.org/10.57235/Jalakotek.V1i2.2606>.
- Silvia, A. (N.D.). Modul Analisis Data Dengan (Stata/Smartpls).
- Wardani Umi, M., & Yoga Kundhani, E. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (Ipm), Dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Tpak) Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Humbang Hasundutan. 5(2), 247–261.
- World Bank. (2000). Empowerment And Poverty Reduction: Evaluation Team. World Development Report 2000/2001.